

DAFTAR ISI

SK Pengesahan Renja SKPD Tahun 2017.....	i
SK Penetapan Renja BKD Tahun 2017.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD.....	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	16
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	17
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	18
3.3 Program dan Kegiatan.....	19
BAB. IV PENUTUP	25
DAFTAR TABEL	
Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKD 2016	13
Tabel 2 Capaian Kinerja Pelayanan BKD Kab. Sidrap.....	17
Tabel 3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017.....	22
Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan.....	25
Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKD Tahun 2017 ke 2018.....	34
SK Penyusunan	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat-nya Laporan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bukanlah akhir dari segalanya. RENJA akan menunjukkan hasil jika capaian yang dihasilkan telah selaras dan bersinergi dengan apa yang dicanangkan dalam RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

RENJA akan menunjukkan hasil jika pertanggung jawaban ini dapat diterima oleh Stakeholder termasuk masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya. RENJA akan memberikan manfaat jika masyarakat dapat mengerti akan makna yang terkandung didalamnya.

Walaupun masih terdapat kekurangan terutama dalam membangun sistem informasi untuk menilai indikator kinerja, kami akan terus lanjutkan semua tugas yang diamanahkan untuk menggapai visi kedepan.

Kami menyakini bahwa eksistensi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sangat tergantung pada bagaimana mempertanggung jawabkan sumber daya yang telah diamanahkan publik kepada organisasi. Sehingga RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ini diharapkan akan memberikan nuansa baru bagi penyelenggaraan aktivitas organisasi, khususnya bagi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Waktu, tenaga, pikiran dan kerja keras telah dicurahkan untuk terbitnya RENJA ini, Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan laporan ini.

Pangkajene Sidenreng, April 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

H I J A S. S H

Pangkat : Pembina Utama Muda
N i p. : 195808081992031008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang bersih (Good Government) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, untuk itu diperlukan pertanggung jawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, bersih dari KKN dan bertanggung jawab dan akuntabel.

Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diamanahkan. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan good government dalam sebuah organisasi akan menjadi competitive advantage bagi penyelenggara dimata publik. Di sisi lain, terselenggaranya Kegiatan perlu ada sinergi antara semua stake holder dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga Pelaksanaan Program dan Kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai sebuah organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berusaha mengembangkan mekanisme penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

secara Proporsional dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

RENJA yang disusun merupakan hasil analisis dan evaluasi Program dan Kegiatan yang sangat prioritas untuk Tahun Anggaran 2016.

1.2 Landasan Hukum

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 29 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pengganti Undang-undang nomor 22 Tahun 1999.

Penyusunan Suatu Kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan Hukum agar supaya kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 1.2.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.2.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 1.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 1.2.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehniks Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

- 1.2.6 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
- 1.2.7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
- 1.2.8 Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Kerja (RENJA) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Renja ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja yang efektif dan efisien .

Esensi dari sistem RENJA bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Perwujudan dari Implementasi sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2017 ini tidak lepas dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2016 yang diperoleh.

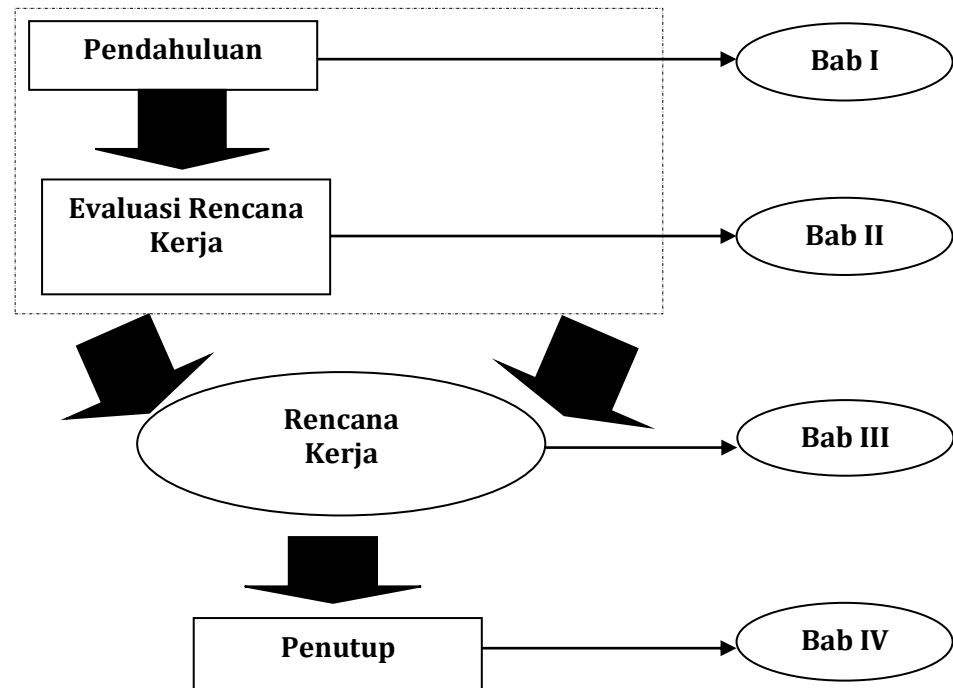
Penyusunan Renja ini memiliki dua Tujuan utama yaitu :

- 1.3.1** Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana bagi Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat suatu Program/Kegiatan.
- 1.3.2** Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua Tujuan utama RENJA tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) oleh setiap instansi pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun sebelumnya sebagai tolak ukur Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2017. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang, Landasan Hukum dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Penyusunan RENJA Tahun Anggaran 2017 dan Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015,

Menjelaskan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan yang berbasis kepada masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan,

Menjelaskan tentang Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah, Sasaran-sasaran yang menjadi indikator dalam penyusunan Renja, Program dan Kegiatan yang akan dintegrasikan dalam Renja Badan Kepegawaian Daerah untuk Tahun Anggaran 2017.

Ba IV Penutup,

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017 ini menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2015

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2017.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 mencapai angka persentase 96,51 Sampai Pada Triwulan IV dari Pagu Anggaran yang diberikan. Pelaksanan Renja tersebut terintegrasi dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Dalam melaksanakan tugas pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 7 Program dan 31 Kegiatan diantara Program dan Kegiatan tersebut ada yang tidak mencapai target disebabkan karena Pemberian Pagu Indikatif sebaiknya perlu dilakukan Kajian secara mendalam, karena menurut kami Pagu yang diberikan sangat terbatas dan hanya habis dipakai dalam biaya administrasi dan biaya operasional. Sebaiknya dari awal Pagu diberikan secara Proporsional sehingga kedepannya target kinerja terhadap pelaksanaan renja tahun kedepannya dapat tercapai.

Rencana Kinerja

Rencana kinerja memuat tentang rencana hasil kerja yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada draf penetapan kinerja tahun 2015 termasuk kegiatan yang diusulkan pada perubahan APBD tahun 2015 baik belanja Tidak Langsung maupun Belanja langsung yang disertai indikator keberhasilan pencapaiannya. Rencana Kinerja BKD Tahun 2015 sebagaimana dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD BKD Tahun 2015 dengan indikasi keberhasilan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak langsung

Belanja Tidak Langsung dengan total dana sebesar Rp. 2.024.515.000 yang meliputi komponen belanja gaji dan tunjangan PNS dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.842.371.000, dan Tunjangan Tambahan Penghasilan dengan jumlah dana sebesar Rp. 182.144.000,-

B. Belanja Langsung

Belanja Langsung dengan total dana sebesar Rp. 3.031.418.000,- meliputi program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam dan luar daerah yang terdiri dari :
 - Penyediaan jasa surat menyurat kegiatan ini terlaksana dengan dengan baik dengan dukungan dana sebesar Rp.1.800.000 dengan realisasi keuangan 100%.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terlaksana dengan baik dengan dukungan dana sebesar Rp. 72.523.000 dengan realisasi keuangan Rp.61.639.573 atau 85%
 - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional terlaksana dengan baik dengan dukungan dana sebesar Rp.4.677.000 dengan realisasi keuangan Rp.4.676.313 atau 100%
 - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan dan perisinan kendaraan dinas/operasional terlaksana dengan baik dengan dukungan dana sebesar Rp.3.000.000 dengan realisasi keuangan Rp.2.725.270 atau 100%

- Penyediaan jasa administrasi Keuangan terlaksana dengan baik dengan dukungan dana sebesar Rp.45.430.000 dengan realisasi keuangan 100%
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor terlaksana dengan baik dengan dukungan dana sebesar Rp.14.000.000 dengan realisasi keuangan 100%
 - Rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah terlaksana dengan baik dengan dukungan dana sebesar Rp.170.738.000 dengan realisasi keuangan 100%
 - Rapat-rapat koordinasi/konsultasi kedalam daerah terlaksana dengan baik dengan dukungan dana sebesar Rp.5.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.844.000 atau 57% namun realisasi tidak mencapai 100% disebabkan karena melebihi dari jumlah perjalanan karena tidak bisa dialihkan ke rekening lain.
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran terlaksana dengan baik dengan dukungan dana sebesar Rp.203.674.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 194.406.250 dengan realisasi atau 95%.
- b. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas orparasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan Jumlah Anggaran Rp.192.882.000 dan realisasi keuangan Rp.164.589.077 Indikasi keberhasilan pelaksanaan program secara kuantitatif yakni terlaksananya seluruh program dan kegiatan dengan realisasi fisik dan keuangan atau 85%. Tidak mencapai 100% disebabkan karena ada 2 kegiatan tidak memenuhi target keuangan

- c. Program peningkatan Disiplin Aparatur meliputi kegiatan; Proses Cerai/ permasalahan keluarga PNS dan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dengan dukungan alokasi dana sebesar Rp.5.547.000. Indikasi keberhasilan pelaksanaan program yakni terlaksananya proses permasalahan PNS dengan realisasi diharapkan menunjukkan tingkat pencapaian kinerja 100%.
- d. Program fasilitas pindah/purna tugas meliputi proses pensiun janda/Duda/Yatim serta pensiun atas permintaan sendiri, dengan dukungan alokasi dana sebesar Rp.47.811.000. Indikasi keberhasilan pelaksanaan program yakni terlaksananya proses pensiun janda/Duda/Yatim serta pensiun atas permintaan sendiri dengan realisasi keuangan Rp.43.113.500 diharapkan menunjukkan tingkat pencapaian kinerja 90%.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan dukungan alokasi dana sebesar Rp.18.940.000.- Indikasi keberhasilan pelaksanaan Program Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi keuangan Rp. 18.340.000. diharapkan menunjukkan tingkat pencapaian kinerja 96% tidak mencapai 100% disebabkan karena adanya PNS yang Pensiun pada tahun anggaran tersebut.
- f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal (tugas dan izin belajar) dengan dukungan alokasi dana sebesar Rp. 443.978.000.- yang digunakan untuk mendanai kegiatan Tugas dan Izin Belajar PNS, Indikasi keberhasilan yakni Realisasi Keuangan fisik dan keuangan Rp. 435.978.000 pelaksanaan program kegiatan 98%.
- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah dengan dukungan dana 1.019.078.000.- dengan realisasi keuangan Rp. 1.002.013.500 dengan tingkat capaian kinerjan 98% disebabkan karena CPNS dari pelamar umum dan formasi khusus dokter biaya penginapan untuk pengajar diklat tidak terpakai karena lokasi

pelaksanaan diklat dilaksanakan di Makasar kampus II Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga realisasi keuangan tidak mencapai 100%

- Fungsional bagi PNS Daerah dengan dana sebesar Rp. 23.500.000,- dengan rencana kinerja yakni Pengikutsertaan sejumlah PNS pada Diklat Teknis Fungsional bagi PNS sesuai dengan analisa kebutuhan Diklat dengan realisasi keuangan 1.890.000 tingkat capaian kinerja 9%. Disebabkan karena masing-masing SKPD menganggarkan dan melaksanakan sendiri-sendiri sesuai bidangnya dan rata-rata pengiriman peserta diklat dibiayai oleh penyelenggara diklat sehingga realisasi keuangan tidak mencapai 100%.
- g. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur meliputi kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan karier PNS, Seleksi Penerimaan CPNS, Penempatan PNS, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, Pemberian Penghargaan PNS yang berprestasi, Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, seleksi penerimaan STKS, IPDN dan Penyempahan CPNS dan PNS dan Proses Kartu Pegawai Elektronik mendukung kegiatan-kegiatan tersebut keseluruhannya berjumlah Rp. 758.842.000. dengan realisasi anggaran sebesar Rp.705.179.940.- indikasi keberhasilan yakni tercapaian target realisasi fisik dan keuangan atau 63%. Disebabkan dua kegiatan tidak terlaksana yaitu :
 - Penyusunan Rencana Pembinaan Karier adalah kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Tk.I dan II yang ingin naik pangkat dan tidak mendapat dukungan dana sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan.
 - Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan total dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut sebanyak Rp. 84.309.000. indikasi keberhasilan yakni tercapaian target realisasi fisik dan keuangan atau 93 %.

- Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemda Kab. Sidrap untuk 2 Priode yaitu April dan Oktober dengan dukungan dana untuk menunjang kegiatan tersebut sebanyak Rp.203.861.000.- dengan indikasi keberhasilan yakni tercapaian target realisasi fisik dan keuangan atau 99 %.
- Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dengan total dana sebesar Rp. 208.585.000.- untuk mendukung kegiatan Sistem Informasi Pegawai dengan indikasi keberhasilan yakni tercapainya target realisi fisik dan keuangan atau 92 %.
- Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi berupa Satyalencana Karya Satya diberikan kepada PNS atas pengabdianya selama dalam kurung waktu tertentu. Penghargaan ini dibagi tiga yaitu pengabdian selama 10, 20 dan 30 tahun. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp. 187.969.000,- meliputi administrasi, biaya pengiriman hingga diterimanya Piagam Penghargaan dengan indikasi keberhasilan yakni tercapainya target realisasi fisik keuangan atau 99 %.
- Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sub bidang kedudukan hukum PNS pada BKD agar disiplin PNS lebih meningkat. Bagi PNS yang terkait dengan kasus, akan diberikan sanksi mulai penjatuhan hukuman disiplin ringan, penjatuhan hukuman sedang, maupun penjatuhan hukuman berat. Untuk kelancaran administrasi kegiatan digunakan dana sebesar Rp. 34.704.000,- dengan indikasi keberhasilan yakni tercapainya target realisasi fisik dan keuangan atau 98 %.
- Seleksi STKS, IPDN merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sub bidang Pengembangan untuk menyeleksi calon pelamar STKS, Peserta seleksi adalah Alumni Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Tahun

2014/2015 seluruh Indonesia yang pendaftarannya melalui Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Jumlah Pendaftar dapat dirinci : STKS, IPDN berjumlah 25 orang dengan dukungan dana sebesar Rp.25.000.000.- dengan indikasi keberhasilan yakni tercapainya target realisasi fisik dan keuangan 8.755.000 atau 35 % disebabkan karena peserta tes untuk Kab. Sidrap tidak ada yang lolos masuk sehingga target keuangan tidak tercapai 100%

- Proses Penyempahan CPNS menjadi PNS adalah kegiatan Bidang Kesejahteraan Pegawai kegiatan ini dilaksanakan agar PNS yang bersangkutan memahami makna Sumpah Janji yang mereka ucapkan dengan dukungan dana sebesar Rp.10.710.000,- dengan realisasi fisik keuangan 5.110.000 atau 48% dan Proses Pemberian Kartu Pegawai Elektronik (E-KPE) agar semua PNS mendapatkan Kartu Pegawai Elektronik karena E-KPE disamping sebagai Kartu Pegawai juga berfungsi sebagai ATM.

Rincian Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program /kegiatan BKD Tahun 2015 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut ;

No	Program	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kapasitas dan pendaya gunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Rp. 520.842.000	Rp. 495.414.906	95
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Rp. 192.880.000	Rp. 162.589.077	84
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Rp. 18.940.000	Rp. 18.340.000	97
4.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Rp. 5.547.000	Rp. 5.547.000	100
5.	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Meningkatnya Proses Administrasi Pengelolaan Pensiun	Rp.47.811.000	Rp.43113.500	90
6.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berkesinambungan	Rp.1.486.556.000	Rp.1.439.881.500	97
7.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang berkesinambungan	Rp.758.842.000	Rp.626.739.090	83
Jumlah			Rp. 3.031.418.000	Rp. 2.791.625.073	92

Adapun rincian evaluasi realisasi tersebut dijelaskan dalam tabel 1 (satu).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing bagian organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah mengalami peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya hal ini dapat dilihat dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun rincian penjelasan tercantum dalam Tabel 2 (dua).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Sebelum menguraikan isu-isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah kami akan menguraikan dulu Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 29 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Tugas Pokok Kepala Badan adalah Memimpin Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal menyusun Badan; membina dan Pengkoordinasian unit kerja dan Instansi terkait; melaksanakan administrasi kepegawaian, pengendalian dan pelaksanaan kewenangan daerah di bidang kepegawain, mengarahkan da membuat petunjuk pelaksanaan.

Sedangkan Fungsi Kepala Badan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan Urusan Kesekretariatan;
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pengembangan dan diklat pegawai;
- c. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang Mutasi Pegawai;
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang Kesejahteraan Pegawai;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Sub. Bagian Perencanaan

- b. Sub. Bagian Keuangan
- c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Bidang Pengembangan Diklat
 - a. Sub. Bidang Pengembangan Karier Pegawai
 - b. Sub. Bidang Diklat
- 4. Kepala Bidang Mutasi
 - a. Sub. Bidang Mutasi
 - b. Sub. Bidang Data dan Simpeg
- 5. Kepala Bidang Kesejahteraan
 - a. Sub. Bagian Kesejahteraan Pensiun dan Taspen
 - b. Sub. Bidang Kedudukan Hukum
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Isu-isu yang dimaksud adalah

- 2.3.1 Terbatasnya dana Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2.3.2 Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menurut hemat kami pada dasarnya yang perlu mereview Rancangan Awal RKPD bukan SKPD meskipun demikian kami mengapresiasi hal tersebut. Rancangan awal RKPD untuk Tahun 2015 sudah mengalami perubahan dengan Rancangan Awal tahun-tahun sebelumnya, kami berharap supaya kedepan nanti tidak istilah kenapa usulan atau Program/Kegiatan tidak terakomodir dalam Pemberian Pagu Indikatif sebaiknya perlu dilakukan Kajian secara mendalam, karena menurut kami Pagu yang diberikan sangat terbatas dan hanya habis dipakai dalam biaya administrasi dan biaya operasional. Adapun

hasil analisis terhadap Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Mengevaluasi dan mencermati Program dan Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun-tahun sebelumnya khususnya dalam pelaksanaan Musrembang SKPD kami tidak pernah ada usulan masyarakat karena kegiatan kami adalah kegiatan rutin saja.

Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017

TABEL 4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2017

Badan Kepegawaian Daerah

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2016.

3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan nasional dan Proritas Pembangunan Nasional terkait Tupoksi Badan Kepegawaian Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010, kebijakan yang diambil Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sidrap dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Membantu melaksanakan rencana kerja lebih rasional.
- b. Memperjelas rencana kerja sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.
- c. Menetapkan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang telah dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.
- d. Mengarahkan Kegiatan yang diprioritaskan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah.

Berdasarkan susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka rumusan tujuan dan sasaran yang terdapat pada Renstra tahun 2014-2018. rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2017.

Berikut merupakan rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Sidenreng Rapang :

a. Tujuan Renja Badan Kepegawaian Daerah.

Tujuan Renja Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2018 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati khususnya misi VI dan Rensra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014-2018 adalah mewujudkan percepatan reformasi birokrasi tata kelola Pemerintahan yang baik penegakan supermasi hukum, dan pengembangan kebijakan yang pro gender, propoor, pro job dan pro environment.

b. Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah.

Sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program. Adapun sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah adalah Meningkatkan Kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah yang berkesinambungan.

c. Indikator sasaran

Indikator sasaran Badan Kepegawaian Daerah dalam RPJMD tahun 2014-2018 adalah :

- Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah.
- Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil.

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai suatu organisasi yang bernaung di bawah pemerintah maka sebagai konsekuensi logis dalam menyusun Rencana Kerja harus berpedoman Peraturan tersebut.

Adapun Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dalam Renja Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

3.3.1 Program

Program pada dasarnya merupakan upaya implementasi strategi organisasi yang sekaligus merupakan penjabaran rinci tentang langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan termasuk didalamnya proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan.

Program yang ditetapkan dalam Renja 2017 ada 7 Program adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Fasilitas Pindah / Purna tugas PNS
- e. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

- f. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- g. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3.3.2 Kegiatan

Kegiatan pada dasarnya merupakan Penjabaran dari Program yang akan dilaksanakan sekaligus merupakan penjabaran rinci tentang langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan termasuk didalamnya proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan.

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Barang Milik Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- c. Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Proses Izin Ceria / Permasalahan Keluarga

- d. Fasilitas Pindah / Purna tugas PNS.
 - Proses Pensiun Janda / Duda dan Yatim serta Pensiun atas permintaan sendiri.

- e. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal.
 - Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

- f. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- g. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
 - Seleksi penerimaan CPNS
 - Penempatan CPNS
 - Pembangunan / Pengembang Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
 - Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
 - Proses penanganan kasus-kasus Pelanggaran disiplin PNS
 - Seleksi Penerimaan STKS, IPDN
 - Proses Penyempahan CPNS menjadi PNS
 - Proses Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik

3.3.3 Indikator Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2017.

Kode	Program/Kegiatan	Indikator
1	2	3
120.1.20.12.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	TERLAKSANANYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
120.1.20.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat
120.1.20.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana rekening listrik dan telpon
120.1.20.12.01.05	Penyediaan Jasa Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
120.1.20.12.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
120.1.20.12.01.07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana honorarium penunjang kegiatan
120.1.20.12.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor
120.1.20.12.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya dana Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas keluar Daerah
120.1.20.12.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Tersedianya dana Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas dalam Daerah
120.1.20.12.01.20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya ATK, Cetakan Penggandaan dan Makan Minum
120.1.20.12.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERLAKSANANYA SARANA DAN PRASARANA APARATUR
120.1.20.12.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
120.1.20.12.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kode	Program/Kegiatan	Indikator
1	2	3
120.1.20.12.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terciptanya Keamanan Gedung Kantor
120.1.20.12.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Siap Pakai
120.1.20.12.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
120.1.20.12.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor
120.1.20.12.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	TERLAKSANANYA KEDISIPLINAN APARATUAR
120.1.20.12.03.06	Proses Izin Cerai / Permasalahan Keluarga	Tercapainya ketentraman dalam keluarga PNS
120.1.20.12.04	PROGRAM FASILITAS PINDAH/FURNA TUGAS PNS	TERLAKSANANYA FASILITAS PINDAH/FURNA TUGAS PNS
120.1.20.12.04.04	Proses Pensiun Janda/Duda dan Yatim serta Pensiun Atas Permintaan sendiri	Terselesainya SK Pensiun tepat waktu
120.1.20.12.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	TERLAKSANANYA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
120.1.20.12.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya Peningkatan PNS yang berkualitas
120.1.20.12.05.07	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD	Terciptanya CPNS yang memiliki wawasan kebangsaan, Keperibadian dan etika PNS serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah Negara.

Kode	Program/Kegiatan	Indikator
1	2	3
120.1.20.12.05.13	Pendiikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD	Tersediaanya PNS yang memiliki kompetensi kepemimpinan aparatur Pemerintah yang sesuai jenjang jabatan struktural
120.1.20.12.05.14	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD	Tersedianya PNS yang memiliki kompetensi tehnik dan fungsional sesuai jenjang tehnik fungsional dalam melaksanakan sebagai PNS
120.1.20.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUNGANAN	TERLAKSANANYA PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUNGANAN
120.1.20.12.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Dokumen Keuangan
120.1.20.12.37	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
120.1.20.12.37.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Tersedianya PNS yang mengikuti Ujian Penyesuaian ijazah dan ujian Kenaikan Pangkat
120.1.20.12.37.02	Seleksi Penerimaan CPNS	Tersedianya CPNS dari tenaga honorer dan pelamar umum
120.1.20.12.37.03	Penempatan PNS	Penempatan PNS berdasarkan jabatan / fungsional
120.1.20.12.37.05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah PNS yang Masuk dan Keluar serta PNS yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala
120.1.20.12.37.08	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	PNS yang telah mengabdikan
120.1.20.12.37.09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Adanya Pengembangan disiplin PNS
120.1.20.12.37.20	Seleksi Penerimaan STKS,IPDN	Tersedianya Calon Mahasiswa IPDN, STKS asal Kab. Sidrap
120.1.20.12.37.21	Penyempahan CPNSD menjadi PNSD	Tersedianya CPNSD untuk diambil sumpahnya
120.1.20.12.37.26	Proses Pemberian KPE bagi PNS	Tersedianya Kartu KPE

BAB. IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun sebelumnya secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran. Dari 7 (tujuh) sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan 31 (Tiga Puluh Satu) Indikator yang telah ditetapkan umumnya mencapai kinerja sasaran dengan angka rata rata capaian 96,51% sampai pada Triwulan ke IV Tahun 2015 .

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu perlu penyusunan perencanaan awal / Renja yang lebih komprehensif dan efektif.

Semoga Penyusunan Renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita-cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat. Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Semoga Penyusunan Renja ini akan memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, April 2016
Kepala Badan Kepegawaian Daerah,

H I J A S, S H

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 195808081992031008